

LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN

**PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Pustaka)**



PENGUSUL:

Haerudin, M.Si

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HAMZANWADI**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian	Pengembangan Desa Wisata dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pustaka)
2. Disiplin Ilmu	Ilmu Lingkungan
3. Ketua Penelitian	
a. Nama Lengkap dan Gelar	Haerudin, M.Si
b. Jenis Kelamin	Laki-laki
c. NIDN/NIS	0831127605
d. Pangkat dan Golongan	III C
e. Jabatan Fungsional	Lektor
f. Jurusan/Program Studi	Teknik Lingkungan
g. Alamat rumah:	Perum. GREEN MULIA No.22 Lendang Batu Sukamulia Timur Lotim
h. Nomor telepon/HP:	081803633419
i. Email:	Zakir.2305@gmail.com
4. Anggota Peneliti	
a. Nama anggota	
b. Nama anggota	
5. Jumlah Biaya yang diusulkan	Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pancor, 29 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi



(Agus Muliadi P., M.Si)
NIDN: 0822088501

Ketua Peneliti,



(Haerudin, M.Si)
NIDN: 0807067801

Menyetujui,
A.n Dekan Fakultas Teknik
Wakil Dekan Bidang Akademik



ABSTRAK

Indonesia sendiri memiliki berbagai potensi daya tarik wisata. Oleh karena itu, berbagai potensi daya tarik wisata dikembangkan agar masyarakat mendapat manfaat terkait potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Pengembangan desa wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan desanya. Selanjutnya, kegiatan pengembangan desa wisata dapat memberikan kehidupan yang standart pada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Peningkatan ekonomi dari pengembangan desa wisata sendiri dapat berupa dampak langsung dan dampak tidak langsung. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep partisipasi masyarakat, pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, pengembangan wisata terhadap peningkatan ekonomi, dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: partisipasi, pengembangan desa wisata, peningkatan ekonomi

PENDAHULUAN

Makna partisipasi menurut Arnstein (1969) dalam Dewi et al. (2013) adalah sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Dijelaskan bahwa partisipasi merupakan redistribusi kekuatan, yang memungkinkan kaum terpinggirkan secara ekonomi dan politik untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan masa depan. Makna partisipasi yang mengacu pada pendapat Arnstein adalah kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya pada masa kini guna mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang.

Verhagen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif

tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Pemikiran tentang partisipasi masyarakat juga diutarakan oleh Slamet (2003), menurut beliau makna partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan/ implementasi, pengawasan dan evaluasi, juga ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Penekanannya disini bahwa partisipasi dalam pembangunan bukan hanya berarti ikut menyumbangkan sesuatu input ke dalam proses pembangunan, tetapi termasuk ikut memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbangkan masukan (input) maupun dalam menikmati hasilnya.

Berdasarkan definisi atau pengertian tentang partisipasi dalam pembangunan seperti diuraikan diatas, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis:

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Kemungkinan adanya jenis partisipasi yang lain masih ada, tetapi seperti halnya dengan jenis ke-5, partisipasi semacam itu tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan

(hasil) pembangunan berarti pula bahwa masyarakat tidak naik tingkat hidup atau tingkat kesejahteraannya (Slamet 2003).

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Pandangan ini serupa dengan Abe (2002) yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak, bukan kewajiban. Orientasi pembangunan kepariwisataan perlu menempatkan fakta di atas sebagai pertimbangan pokok dalam menumbuhkembangkan kapasitas dan kapabilitas pada masyarakat (Beeton 2006). Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan sekaligus merealisasikan peran sentral masyarakat dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan sesuai dengan harapan dan kemampuan yang dimiliki.

Pengembangan desa wisata di Indonesia lebih banyak difasilitasi negara, sedangkan masyarakat cenderung pasif. Akibatnya, kapasitas lokal di dalam merespon inovasi yang disponsori oleh negara melalui pembangunan desa wisata masih menghadapi sejumlah persoalan krusial (Damanik 2009). Bottom up planning memaksa komunitas lokal untuk berpikir dan bergerak guna merancang dan memutuskan pola pembangunan pariwisata yang memihak kepentingan komunal. Mubyarto (1988) menegaskan bahwa partisipasi merupakan kesediaan membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan sendiri.

Partisipasi intinya adalah sikap sukarela dari masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan. Selain itu, partisipasi juga dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan mental sekaligus emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas tujuan kelompok, termasuk pelaksanaan program-program tersebut. Pelibatan ini membuat masyarakat merasa memiliki dan

bertanggung jawab terhadap proses keberlanjutan program pembangunan. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan diharapkan akan memberikan ruang bagi perkembangan aktivitas yang berorientasi kompetisi dan tanggung jawab sosial oleh anggota komunitas itu sendiri. Pentingnya partisipasi dalam pembangunan memberikan arti bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar, maka harus melibatkan warga (Bryson 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan dan mendapatkan data secara empiris dalam lingkungan sosial masyarakat. Data dikumpulkan dari sampel yang mewakili seluruh populasi untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah penelitian sebagai hasil dari pengumpulan data, penyusunan dan pengelompokan data serta pengolahan atau analisis data.

Untuk memperoleh data yang diharapkan dapat menunjang penelitian, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik Studi Kepustakaan. Dengan teknik ini, penulis mencoba memperoleh data, informasi, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian dari buku, hasil penelitian, laporan, artikel, internet, dan media massa yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Pengembangan Desa Wisata

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata

merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membuat suatu program yang bernama Pariwisata Inti Rakyat (PIR) atau dengan istilah lainnya yaitu *community-based tourism*. Menurut PIR, Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Berdasarkan pengembangan pariwisata dan kualitas dari objek dan daya tarik wisata yang dijadikan sebagai kriteria utama, pariwisata berbasis masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) sebagaimana terdapat dalam *Development of Community Based Tourism: Final Report, 2003* (Purnamasari, 2011) yaitu:

1. *Basic Visitor facilities*. Tipe ini terdiri atas fasilitas pariwisata yang sangat mendasar seperti akomodasi home stay dan restoran yang melayani pengunjung. Tipe ini biasanya diperuntukkan bagi desa yang terletak di rute yang menuju objek dan daya tarik wisata. Tipe ini tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan dan pada tipe ini, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal masih sedikit.
2. *Basic visitor facilities plus tourism theme*. Pada tipe ini, biasanya disediakan fasilitas dasar dengan tema tertentu yang bertujuan untuk

meningkatkan jumlah pengunjung, misalnya dengan menetapkan tema pertanian organik atau wisata alam. Tipe pengembangan pariwisata ini masih berskala kecil dan biasanya merupakan inisiatif dari pengusaha lokal.

3. Handicraft Villages. Pengembangan tipe ini biasanya dilakukan pada desa-desa yang berfungsi sebagai pusat lokasi produksi dan penjualan barang hasil kerajinan, dan juga merupakan desa yang masih kurang atau bahkan tidak memiliki atraksi lainnya. Pengelolaannya cenderung berdasarkan pada ikatan keluarga atau kelompok dan menggunakan tenaga kerja lokal.
4. Hotels and Villages Communities. Masyarakat di daerah ini berada di sekitar hotel atau resort yang pembangunannya terintegrasi. Masyarakat mendapat manfaat langsung dan tidak langsung dari pengembangan pariwisata tipe ini. Manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan dan pelatihan baik di hotel maupun di pusat penjualan barang produksi kerajinan, sedangkan manfaat lainnya adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, dll.
5. Traditional Tourism Villages. Pengembangan pariwisata tipe ini menonjolkan budaya dan adat istiadat perdesaan, gaya hidup masyarakat, dan arsitektur tradisional yang dikemas dalam lingkungan yang menarik.
6. Community Close To primary Tourism Attraction. Daya tarik dari desa ini adalah atraksi wisata alam dan buatan yang dipadukan sehingga menarik wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.
7. Integrated and Organized Community Based Tourism. Tipe ini terorganisasi dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Adapun karakteristik pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan “Saint Lucida Heritage” dalam Purnamasari (2011), antara lain: melibatkan perencanaan partisipatif dalam setiap tahapan; menciptakan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal; mendukung lembaga masyarakat; mendorong kohesi sosial; menciptakan kebanggaan masyarakat;

meningkatkan pengembangan individu dalam mengurangi aliran desa-kota; meningkatkan nilai tambah untuk budaya dan tradisi lokal; menyediakan keuntungan infrastruktur; menciptakan kesempatan dan pekerjaan dengan kegiatan ekonomi baru; tidak mengubah kegiatan ekonomi yang sudah ada; menciptakan hubungan ekonomi antar sektor; menyediakan pasar untuk promosi barang dan jasa; berkontribusi untuk pembangunan yang seimbang; memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi tidak mengeksploitasi; memperkecil dampak lingkungan; mendorong masyarakat agar tidak konsumtif dalam menggunakan sumber daya.

Kaitannya dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Selain itu, komponen penting yang perlu ada dalam pengembangan desa wisata itu sendiri adalah

1. Partisipasi masyarakat lokal
2. Sistem norma setempat
3. Sistem adat setempat
4. Budaya setempat Prasiasa (2011) dalam Suprihardjo et. Al (2014).

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa komponen desa wisata yaitu

1. Memiliki keunikan, keaslian, sifat khas
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya Gumelar (2010) dalam Suprihardjo et. Al (2014).

Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan berbasis masyarakat (community based tourism-CBT) merupakan model pembangunan yang memberikan peluang yang sebesar-

besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. CBT merupakan sebuah kegiatan pembangunan pariwisata yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Ide kegiatan dan pengelolaan dilakukan seluruhnya oleh masyarakat secara partisipatif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, dalam CBT peran masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan desa wisata (Dewi 2013).

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Konsep pengembangan desa wisata dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk pengembangan masyarakat dalam bidang pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan agenda WTO (2000) untuk pariwisata berkelanjutan, terlihat bahwa pariwisata berbasis masyarakat fokus pada dampak sosial-budaya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata; melibatkan anggota masyarakat dari awal dalam semua aspek; menggalakkan kebanggaan masyarakat; meningkatkan kualitas hidup; menjamin kelestarian lingkungan; mempertahankan karakter unik dan budaya daerah setempat; pembelajaran lintas budaya; menghormati perbedaan budaya dan menghargai martabat manusia; mendistribusikan manfaat secara merata di antara anggota masyarakat; kontribusi pendapatan untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan menurut Drake (1991) dalam Purnamasari (2011), beberapa prinsip dalam penerapan pariwisata berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: small scale, tahapan dimulai dari lapis paling bawah, menekankan pada pemenuhan basic needs dan self reliance; proses pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat dan otoritas tertinggi ada di tangan masyarakat lokal, memegang prinsip-prinsip kesamaan sekaligus perbedaan dan ketimpangan, optimalisasi

pemanfaatan sumber daya lokal, tidak mengabaikan identitas masyarakat lokal, menekankan pada human capital bukan financial capital, dan menekankan pada manfaat dan distribusi produksi bukan akumulasi modal/capital.

Keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing 2001) dalam Dewi (2013). Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Ilustrasi yang dikemukakan Wearing (2001) dalam Dewi (2013) tersebut menegaskan bahwa masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pengabaian partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menjadi awal dari kegagalan tujuan pengembangan desa wisata (Nasikun, 1997). Menurut Timothy (1999) ada dua perspektif dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pariwisata. Kedua perspektif tersebut adalah partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, dan berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Timothy menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengakomodasi keinginan dan tujuan masyarakat lokal dalam pembangunan serta kemampuannya dalam menyerap manfaat pariwisata.

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, Timothy

memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan.

Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di jelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006), kepariwisataan memiliki dua aspek kelembagaan dan aspek substansial yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisikelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya.

Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya, yakni bagaimana perkembangannya dari mulai direncanakan, dikelola sampai dipasarkan pada pembeli yakni wisatawan. Sedangkan jika dilihat dari sisi manfaat pariwisata, menurut Marpaung (2002), sesuai perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Menurut Tibout yang dikutip oleh Yoeti (2008) dampak pariwisata bagi perekonomian lokal pun sangat tinggi, karena uang yang dibelanjakan wisatawan merupakan uang segar (fresh money) bagi perekonomian lokal yang dapat mempengaruhi perekonomian setempat dan dapat

langsung dinikmati oleh masyarakat. Dampak pariwisata dilihat dari segi perekonomian nasional (macro economic) dapat dilihat dari dua segi (Yoeti, 2008) yaitu:

1. Dampak langsung yang ditimbulkan pariwisata dilihat dari segi ekonomi (the direct effect that tourism usually has on the economy). Indikator untuk hal ini diantaranya:
 - a. Neraca Pembayaran (Its effect on Balance of Payment)
 - b. Kesempatan kerja (Its effect on employment)
 - c. Pemerataan Pendapatan (Its effect on the redistribution of income)
2. Dampak secara tidak langsung (The Indirect Effect) yang ditimbulkan kegiatan pariwisata sebagai suatu industri. Di antaranya berupa:
 - a. Hasil pelipatgandaan (Multiplier Effect) yang ditimbulkannya.
 - b. Pemasaran terhadap produk-produk tertentu yang berkaitan dengan pariwisata.
 - c. Penerimaan pajak pemerintah.
 - d. Dampak “peniruan” yang dapat mempengaruhi masyarakat banyak.

Wisata dapat memberikan kehidupan yang standart pada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan tempat tujuan wisata, yang dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata. Dalam proses pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan warga hendaknya tidak saja dijadikan objek, melainkan sebagai subyek dalam menentukan arah perkembangan masyarakat, sehingga jika warga masyarakat menolak investasi yang masuk, maka pemerintah juga tidak dapat memaksakan kehendaknya (Raharjana 2012). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam

wilayah tersebut (Arsyad 2004). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen penting dari pembangunan berkelanjutan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, sekaligus melindungi sumber daya alam. Istilah partisipasi lokal di sini adalah kemampuan masyarakat lokal untuk mempengaruhi hasil dari proyek-proyek pembangunan seperti pengembangan wisata yang berdampak pada mereka (Drake 1991) dalam Purnamasari (2011). Masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata mulai dari awal perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Penerapan ekowisata sendiri perlu melibatkan masyarakat lokal karena ini berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, agar tercipta sumberdaya alam yang lestari sekaligus meningkatnya kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, maka dalam pengembangan desa wisata sangat memerlukan partisipasi masyarakat lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan azas, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, asli dan merata, perikehidupan

dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri. dalam melaksanakan program atau proyek pembangunan, diperlukan adanya peran serta atau partisipasi masyarakat, sehingga proyek ataupun program pembangunan tersebut tepat sasaran yang mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Peran masyarakat yang tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1990 adalah masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dan dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. Partisipasi masyarakat dapat diartikan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau pengelolaan, pengawasan dan evaluasi dalam usaha pengembangan industri pariwisata, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab tumbuh pada masyarakat terhadap objek wisata yang ada di daerahnya.

Brandon (1993) dalam Dalimunthe (2007) mengatakan perencanaan dan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat setempat. Bentuk Partisipasi masyarakat meliputi enam kriteria, yakni:

1. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata.
2. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata.
3. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.
5. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat pendapatan (leakage) serendah-rendahnya, dan
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri seperti mencakup: umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berasal dari luar masyarakat itu sendiri, dimana mencakup: lingkungan, cuaca, stakeholder yang terlibat (pemerintah daerah, pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan fasilitator). Faktor penghambat dan pendukung sendiri mencakup faktor internal dan faktor eksternal pada sub-bab sebelumnya. Namun, pada faktor penghambat Tosun (2000) telah membagi hambatan partisipasi masyarakat kedalam tiga bagian hambatan operasional, hambatan struktural dan, hambatan budaya/cultural. Pada penelitian sebelumnya Mustapha et al. (2013) telah mengkatagorikanketiga tipe hambatan.

1. Tipe hambatan operational seperti: keengganan pemegang saham terhadap berbagi kekuasaan, sentralisasi administrasi publik, dan kurangnya informasi.
2. Tipe Hambatan structural yaitu: Dominasi Elite, Kurangnya sumber daya keuangan, Sikap profesional, dan Kurangnya hukum yang sesuai sistem.
3. Tipe hambatan cultural yaitu: Terbatasnya kemampuan masyarakat orang miskin, apatis, dan rendahnya tingkat kesadaran di komunitas lokal.

Dari beberapa hasil literatur yang telah saya baca masih banyak serta beragam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakatseperti:

dilibatkannya masyarakat secara langsung, adanya keinginan, kemampuan dan kemauan dari masyarakat untuk dilibatkan, serta adanya motivasi akan pendapatan dan terjaganya lingkungan (pendukung), kekurangan SDM, modal sosial, dan kurang optimalnya peranan stakeholder (penghambat).

Melalui pengembangan Desa Wisata, masyarakat di pedesaan, khususnya pedesaan yang memiliki potensi daya tarik berupa alam maupun budaya, diberi wawasan mengenai Kepariwisataaan, diberi kemampuan untuk mengambil manfaat dari keberadaan potensi dan daya tarik desanya. Pariwisata

adalah suatu kegiatan yang memiliki dampak dinamis yang luas dimana berbagai usaha dapat tercipta melalui kegiatan pariwisata. Komponen utama dalam kegiatan pariwisata adalah daya tarik wisata yang didukung oleh komponen lainnya, antara lain; transportasi, akomodasi, restoran, atraksi budaya dan cenderamata. Komponen tersebut menyediakan fasilitas dan layanan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata. Selanjutnya dari kegiatan komponen pariwisata tersebut akan timbul kegiatan usaha lainnya yang merupakan dampak yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan pariwisata, seperti; usaha penyedia BBM, usaha penyedia bahan makanan seperti sayursayuran untuk restoran, usaha perabot interior untuk hotel, usaha penyedia bahan properti untuk atraksi seni budaya, usaha penyedia bahan baku pembuatan cenderamata, usaha penukaran uang (money changer), usaha penyedia obat-obatan (drug store), dan masih banyak lagi dampak ikutan yang akan muncul untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Soekarya 2011).

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke desa wisata tentu akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat pedesaan (Soekarya 2011). Dampak yang muncul dari suatu kegiatan wisata, yaitu munculnya dampak ekonomi. Dampak positif yang muncul dari adanya dampak ekonomi dapat bersifat langsung (direct). Selain dampak positif langsung yang muncul, ada dampak lain yang akan timbul, seperti dampak tidak langsung (indirect impact). Dampak tidak langsung berupa aktivitas ekonomi lokal dari suatu pembelanjaan unit usaha penerima dampak langsung dan dampak lanjutan (induced impact). Dampak lanjutan ini dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan masyarakat lokal.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan wisata pada dasarnya dilihat dari keseluruhan pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, konsumsi (baik konsumsi dari rumah maupun di lokasi wisata), biaya perjalanan kelokasi wisata, pembelian souvenir, serta pengeluaran lainnya. Keseluruhan dari biaya pengeluaran wisatawan akan diestimasi dari jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan dengan rata-rata pengeluaran dalam satu kali kunjungan

wisata. Untuk mewujudkan desa wisata yang diinginkan diperlukan adanya political will dari pimpinan pemerintah daerah beserta aparatnya, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dan upaya-upaya antara lain:

1. Menyamakan persepsi antar Pejabat yang menangani Pariwisata dan Pejabat Dinas terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat, mengenai pengembangan desa wisata dan manfaatnya sehingga terwujud suatu komitmen dan kemauan yang kuat untuk mengembangkan desa wisata
2. Menjalin koordinasi yang erat antar para Kepala Dinas yang menangani Pariwisata dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat/agama/budaya serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk sama-sama berperan dalam mewujudkan Desa Wisata (siapa melakukan apa)
3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu mengambil manfaat dari kedatangan wisatawan dengan berusaha di bidang penyediaan berbagai kebutuhan bagi wisatawan, termasuk pelatihan untuk peningkatan kemampuan dalam bidang pemasaran desa wisata (Soekarya 2011).

KESIMPULAN

Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Keikutsertaan masyarakat juga dijelaskan secara eksplisit dijelaskan dalam UU RI No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pengembangan wisata sendiri tentunya melalui beberapa tahapan dari tahapan (1) perencanaan,

(2) pelaksanaan, (3) pengelolaan atau pemanfaatan, (4) menikmati hasil dan (5) evaluasi. Semua tahapan tersebut tidak terlepas dari adanya peran atau kontribusi yang diberikan oleh beberapa pihak terutama masyarakat sekitar kawasan wisata. Brandon (1993) dalam Dalimunthe (2007) mengatakan perencanaan dan pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat setempat. Bentuk Partisipasi masyarakat meliputi enam kriteria, yakni:

1. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata.
2. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata.
3. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.
5. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat pendapatan (leakage) serendah-rendahnya, dan
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Hal ini menandakan bahwa ada atau tidaknya partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu kunci penting dari suatu keberhasilan program pengembangan wisata di suatu kawasan. Dalam penerapannya partisipasi masyarakat dipengaruhi faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri seperti mencakup umur,

status warga, jenis kelamin, status pekerjaan, tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan, agama, budaya dll. sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat berasal dari luar kendali masyarakat itu sendiri, seperti mencakup kondisi lingkungan sosial dan masyarakat, kondisi cuaca, peraturan, perizinan, finansial, keterlibatan stakeholder (pemerintah daerah, pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan fasilitator) dll.

Selain faktor internal dan eksternal adapula faktor penghambat dan pendukung. Terkait faktor penghambat dan pendukung sendiri mencakup faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri yang mampu memberikan masyarakat berupa dorongan atau sebaliknya untuk berpartisipasi masyarakat. Menurut, Tosun (2000) hambatan partisipasi masyarakat dibagi kedalam tiga bagian: (1) hambatan operational seperti, keengganan pemegang saham terhadap berbagi kekuasaan, sentralisasi administrasi publik, dan kurangnya informasi. (2) Tipe hambatan structural yaitu: Dominasi Elite, Kurangnya sumber daya keuangan, Sikap profesional, dan Kurangnya hukum yang sesuai sistem. (3) Tipe hambatan cultural/budaya yaitu: Terbatasnya kemampuan masyarakat orang miskin, Apatitis, dan rendahnya tingkat kesadaran dikomunitas lokal.

Melalui pengembangan Desa Wisata, masyarakat di pedesaan, khususnya pedesaan yang memiliki potensi daya tarik berupa alam maupun budaya, diberi wawasan mengenai Kepariwisata, diberi kemampuan untuk mengambil manfaat dari keberadaan potensi dan daya tarik desanya. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang memiliki dampak dinamis yang luas dimana berbagai usaha dapat tercipta melalui kegiatan pariwisata. Komponen utama dalam kegiatan pariwisata adalah daya tarik wisata yang didukung oleh komponen lainnya, antara lain; transportasi, akomodasi, restoran, atraksi budaya dan cenderamata. Komponen tersebut menyediakan fasilitas dan layanan secara langsung dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata.

Melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada peningkatan ekonomi

di wilayah pengembangan desa wisata itu sendiri. Dampak positif yang muncul dari adanya dampak ekonomi dapat bersifat langsung (direct). Selain dampak positif langsung yang muncul, ada dampak lain yang akan timbul, seperti dampak tidak langsung (indirect impact). Menurut Tibout yang dikutip oleh Yoeti (2008) dampak pariwisata bagi perekonomian lokal pun sangat tinggi, karena uang yang dibelanjakan wisatawan merupakan uang segar (fresh money) bagi perekonomian lokal yang dapat mempengaruhi perekonomian setempat dan dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Dampak pariwisata dilihat dari segi perekonomian nasional (macro economic) dapat dilihat daridua segi (Yoeti, 2008) yaitu:

1. Dampak langsung yang ditimbulkan pariwisata dilihat dari segi ekonomi (the direct effect that tourism usually has on the economy).

Indikator untuk hal ini diantaranya:

- Neraca Pembayaran (Its effect on Balance of Payment)
- Kesempatan kerja (Its effect on employment)
- Pemerataan Pendapatan (Its effect on the redistribution of income)

2. Dampak secara tidak langsung (The Indirect Effect) yang ditimbulkan kegiatan pariwisata sebagai suatu industri. Di antaranya berupa:

- Hasil pelipatgandaan (Multiplier Effect) yang ditimbulkannya.
- Pemasaran terhadap produk-produk tertentu yang berkaitan dengan pariwisata.
- Penerimaan pajak pemerintah.
- Dampak “peniruan” yang dapat mempengaruhi masyarakat banyak.

Daftar Pustaka

- Abe, A. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo: Pondok Edukasi. Adiyoso,
- W. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: ITS Press.
- Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta [ID]: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

- Beeton, S. 2006. *Community Development Through Tourism*, Australia:Landlinks Press.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Perkembangan Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Jumlah Kedatangan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk 1997-2008. [Internet]. Dapat dilihat di: www.bps.go.id/booklet/booklet_okt2009.pdf
- Bryson, J. M., 1995, *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations : A guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*, Jossey-Bass Publishers: San Francisco.
- Dalimunthe N. 2007. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi wisata bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. [tesis]. [Internet]. [dikutip 12 Oktober 2015]. Medan [ID]: Universitas Sumatera Utara 142 Hal. Dapat diunduh dari: repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7119/1/08E00254.pdf
- Damanik, J., 2009, “Isu-Isu Krusial Dalam Pengelolaan Desa Wisata Dewasa Ini”, *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 5 (3): 127-137.
- Dewi Made HU, Fandeli Chafid, Baiquni M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. [Jurnal KAWISTARA: Vol 3 N0 2]. [Internet]. [dikutip tanggal 29 Oktober 2015]. Yogyakarta [ID]: UGM. Dapat diunduh dari: <http://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3976/3251>
- Dritasto A, Anggraeni AA. 2013. Analisis Dampak Ekonomi Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Pulau Tidung. [Jurnal Online Institut Teknologi Nasional: Vol 10 No 20]. [Internet]. [dikutip tanggal 29 Oktober 2015]. Bandung [ID]: Itenas. Dapat diunduh dari: <http://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekaloka/article/view/102>
- Herawati, T. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Depok. [Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Vol 10 No 2]. [Internet]. [dikutip tanggal 29 Oktober 2015]. Jakarta